



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

Alamat : Pasar Baru Pangkalan – Telp. (0752) 55002

**KEPUTUSAN CAMAT PANGKALAN KOTO BARU
NOMOR 01 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN (PPK), PEMBANTU PPTK, PEMBANTU BENDAHARA DAN PEJABAT PENERIMA HASIL
PEKERJAAN (PPHP)
PADA KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
TAHUN ANGGARAN 2018**

CAMAT PANGKALAN KOTO BARU,

- Menimbang : c. bahwa dalam rangka kelancaran Pelaksanaan tugas dibidang Administrasi dan Pengelolaan Keuangan, maka dipandang perlu untuk penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu PPTK, Pembantu Bendahara dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada SKPD Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun Anggaran 2018;
- d. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud huruf a di atas, perlu menetapkan dengan suatu Keputusan Camat Pangkalan Koto Baru.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang -undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4579);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Penataan Wilayah Kecamatan Dalam Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2001);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Rencana Strategi (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2002 Nomor 58);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 153);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018);
21. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 537 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018.

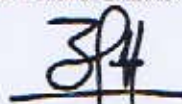
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu PPTK, Pembantu Bendahara dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini .
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu PPTK, Pembantu Bendahara dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bertanggung jawab kepada Camat Pangkalan Koto Baru selaku Pengguna Anggaran (PA) Sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- KETIGA : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Pangkalan
pada tanggal 03 Januari 2018

CAMAT PANGKALAN KOTO BARU



IONIANTO. S.STP

NIP. 19810531 200012 1 001

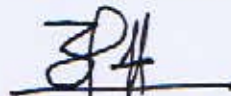
LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PANGKALAN KOTO BARU
 NOMOR 01 TAHUN 2018
 TANGGAL 03 JANUARI 2018
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK),
 PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEMBANTU PPTK DAN PEJABAT
 PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) PADA KECAMATAN PANGKALAN
 KOTO BARU TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	ZULKIFLI LUBIS, S.Pd NIP. 19640720 200012 1 001	SEKCAM	PPTK	
2.	MELSY OKTANOVA, A.Md NIP. 19801020 200604 2 008	KASUBAG KEUANGAN, PELAPORAN DAN EVALUASI	PPK	
3.	ZAKI MARTA NANDA, S.STP NIP. 19920215 201406 1 001	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN	PEMBANTU PPTK	Program : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.	SUPARNI NIP. 19611130 198101 2 001	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	PEMBANTU PPTK	Kegiatan : 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan sosial, Raskin dan kesejahteraan sosial lainnya 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
5.	SUDIRMAN NIP. 19680219 199001 1 001	KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PEMBANTU PPTK	Kegiatan : 1. Bimbingan supervisi dan pengawasan Dana Nagari 2. Pelaksanaan musyawarah pembangunan Desa 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
6.	M. NASIR, S.Pd NIP. 19660101 200003 1 008	KASI PELAYANAN	PEMBANTU PPTK	Kegiatan : 1. Penyelenggaraan PATEN
7.	SYAHRUL ISMAN, S.Ag NIP. 19750709 201010 1 003	KASI TRANTIB	PEMBANTU PPTK	Kegiatan : 1. Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
8.	ANTARDI PUTRA, A.Md NIP. 19661004 198903 1 004	KASI PEMERINTAHAN	PEMBANTU PPTK	Kegiatan : 1. Bimbingan supervisi dan pengawasan penyusunan APB Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Publik 2. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
9.	SULMARNI NIP. 19830310 201001 2 022	STAF	PEMBANTU BENDAHARA	
10.	IGEMMESTI NIP. 19741015 200604 2 010	STAF	PPHP	

Ditetapkan di Pangkalan
Pada tanggal 03 Januari 2018

CAMAT PANGKALAN KOTO BARU



IONIANTO, S.STP
NIP. 19810531 200012 1 001